

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebagai masyarakat Negara, yang secara antropologis terdiri dari atas lebih dari 500 suku Bangsa (ethnic group) dengan ciri-ciri dan bahasa dan kultur sendiri. Bahkan lebih unik lagi, setiap suku Bangsa di Indonesia dapat dikatakan mempunyai suatu daerah asal, satu pengalaman sejarah, dan satu nenek moyang sendiri. Orang Tionghoa yang pada awalnya datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang yang dikenal dengan panggilan orang Tionghoa kedudukan Tiongkok oleh penduduk nusantara merupakan bagian dari sejarah masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonel Belanda orang – orang Tionghoa ini juga masih terlihat sebagai pedagang bahkan pada saat sekarang ini pada umumnya berdomisili di pusat – pusat keramaian kota.

Memasuki masa reformasi kedudukan orang tionghoa ini dipertanyakan kedudukannya. Mereka ini sebagai warag menumpang tinggal di Indonesia atau dikatakan sebagai warga Indonesia. Pemerintah menjawabnya dengan alasan yang kuat disertai dasar hukum yang jelas yaitu, etnis Tionghoa yang ada di Indonesia statusnya resmi sebagai warga negara Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 26 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Yang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang –orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yan disahkan dengan Undang – Undang sebagai warga Negara”. Adalah suatu fakta sejarah yang tak terbantah, bahwa warga etnis Tionghoa adalah pendatang terlepas dari kenyataan tentang kedatangan yang terjadi berabad-abad yang lampau, sehingga keberadaanya bukan lagi hal baru, fakta sejarah ini tidak bisa lagi dihapus dan diterima sebagai bagian integral orang Tionghoa di Indonesia. Hak untuk hidup di tempat tinggalnya sekarang secara legal sudah

dilindungi Undang-Undang, terutama karena warga Tionghoa telah memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), lengkap segala hal dan kewajiban yang melekat padanya. Jadi secara sosiologis, posisi warga etnis Tionghoa telah berubah dari pendatang menjadi penduduk dan warga Negara. Selain itu, pasal 27 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “ segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dasar ini semakin mempertegas tentang kedudukannya etnis Tionghoa bahwa mereka telah menjadi warga negara Indonesia bukan hanya sebagai status, tetapi ikut juga aktif secara sah dan legal dalam unsur-unsur pemerintahan.

Di samping itu, kerena alasan hak asasi manusia dan sikap Non-Diskriminasi, sejak masa pemerintahan BJ Habibie melalui Instruksi Presiden NO. 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan Istilah Pribumi dan Non- Pribumi, seluruh aparatur pemerintah telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan China dengan warga Negara Indonesia pada umumnya. Walaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah menunjuk pada adanya keragaman etnis saja, seperti Jawa, Sunda, Arab, Manado, China dan lain sebagainya. Karena itu, status Hukum dan status sosiologis golongan keturunan Tionghoa di tengah masyarakat Indonesia sudah tidak perlu lagi dipersoalkan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Indonesia sangat menjaga keharmonisan kultur-kultur yang ada didalamnya, sehingga secara responabilitas pada masa orde baru yang dikenal istilah Pribumi dan Non-Pribumi langsung di ubah keberadaannya setelah memasuki era reformasi dengan istilah WNI dan WNA untuk mencengah diskriminasi antara sesama warga Indonesia. Namun, masalah dari

deskriminasi itu dapat terlihat dari peran mereka untuk ikut dalam kegiatan pemerintahan atau unsur-unsur politik.

Kenyataan menunjukkan bahwa penulis melihat di Kota Medan ada suatu daerah di kecamatan Medan Petisah secara mayoritas didomisili oleh orang-orang Tionghoa yang jauh kehidupannya dari hal-hal politik maupun pendidikan politik dalam konteks Nasionalisme. Mereka lebih tertarik untuk berkecimpung dalam bidang ekonomi /pengusaha dan kegiatan mengarah perjudian.

Maka pada kesempatan ini, tema sentral penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA MEDAN DALAM MEMILIH WALIKOTA MEDAN PERIODE 2009-2014.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam setiap penelitian, permasalahan merupakan hal yang paling utama dan diiringi dengan bagaimana cara pemecahannya. Maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Tingkat Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Petisah dalam pemilihan Walikota Medan tahun 2009-2014
2. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat Tionghoa pada pemilihan Walikota Medan tahun 2009-2014

3. Partisipasi politik masyarakat Tionghoa pada Pemilihan Walikota Medan tahun 2009-2014.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian masalah harus cukup terbatas, artinya tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, masalah yang terlalu luas mudah menjadi kabur dan masalah yang terlalu sempit mudah kehilangan arti dan kegunaanya.

Pembatasan masalah merupakan upaya menetapkan batas-batas permasalahan untuk mengidentifikasi faktor mana yang termasuk kedalamnya. Maka dapat dibuat batasan masalah sebagai fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat partisipasi masyarakat Tionghoa di kecamatan Medan Petisah pada Pemilihan Walikota Medan periode tahun 2009-2014
2. Partisipasi politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Walikota Medan periode tahun 2009-2014.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat persepsi masyarakat Tionghoa di Kecamatan Petisah dalam Pemilihan Walikota Medan periode tahun 2009-2014
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Tionghoa dalam pemilihan Walikota Medan periode tahun 2009-2014.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah, pembatasan masalah dan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini berjuan untuk mengetahui bagaimana Tingkat Partisipasi

Politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan Walikota Medan di Kecamatan Medan Petisah tahun 2009-2014. Adapun tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Tionghoa di Kecamatan Medan Petisah dalam Pemilihan Walikota Medan periode tahun 2009-2014
2. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan Walikota di Kecamatan Medan Petisah Periode tahun 2009-2014.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari diadakanya Penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta cara berfikir khususnya di bidang politik, sosial dan budaya.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi, dan pengetahuan serta daapt dijadikan bahan pertimbangan akan kekurangan dan kelebihan serta kelemahan dari pelaksanaan pemilihan Walikota, sebagai wujud indikasi dari Masyarakat Nasional Indonesia yang plural akan rasa Nasionalisme.
3. Sebagai bahan kajian atau menambah literatur untuk penelitian lebih lanjut bagi masyarakat Kampus Perguruan Tinggi Khususnya Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan politik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Politik

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dari dalam pikiran (*mind*) manusia dan karena bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan

Meriam Budiarjo (1992:30)

Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Mengerti itu hanya dipakai dalam pikiran kita. Konsep adalah konstruksi mental, suatu ide yang abstrak, yang menunjukkan kepada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki oleh fenomena itu. Jadi, konsep adalah abstraksi dari atau mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas, atau dasar konsep seperangkat konsep dapat disusun dan dirumuskan generalisasi. Konsep biasanya dirumuskan dalam satu kata atau dua kata.

Generalisasi adalah proses melalui suatu nama observasi mengenai suatu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Melalui konsep, generalisasi melihat hubungan-hubungan sebab akibat (kausal) antara beberapa fenomena atau cara yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan, jika kita menyebut sesuatu *typical*, kita membuat generalisasi.

Generalisasi yang paling tinggi atau yang paling sophisticated derajat generalisasinya dinamakan teori. Dalam kehidupan keseharian, kita sering mengontraskan teori dengan praktik atau teori dengan fakta.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan, d) kewajiban-kewajiban (*obligation*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup : masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga Negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *the study of political theory* dapat dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.

A. Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*). Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai (*values*) ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai (*valuational*) termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi dan sebagainya.

B. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non-*valuational* (*value-free*) biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (*membandingkan*). Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Teori-teori politik yang mempunyai dasar moral fungsinya terutama untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini, karena dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur

hubungan dan interaksi antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga disatu pihak memberi kepuasan perorangan, dan dipihak lain dapat membimbingnya menuju kesuatu struktur masyarakat politik yang stabil tetapi dinamis. Atasdasar itu politik menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik.

Teori-teori yang termasuk dalam kelompok A dapat dibagi lagi dalam tiga kelompok, yaitu filsafat, teori sistematis, dan ideologi.

a. Filsafat Politik

Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio, ia melihat jelasadanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta (universe) dengan sikap dan hakikat dari hakikat dari kehidupan politik didunia fana ini. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta, seperti metafisika dan epistemologi harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi, misalnya, menurut filsafat Yunani, Plato, Keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik (*good life*) yang dicita-citakan olehnya. Contoh lain adalah beberapa karya Jhon Locke. Filsafat politik erat hubungannya dengan etika dan filsafat sosial.

b. Teori politik sistematis (*Systematic Political Theory*)

Teori-teori ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi mendasar diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim di terima pada masa itu. jadi, tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori-teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa langsung menetapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Misalnya, dalam abad ke- 19 teori-

teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan Negara dan mengenai adanya sistem hukum dan politik yang sesuai dengan pandangan itu. Bahasan-bahasan ini di dasarkan atas pandangan yang sudah lazim pada masa itu mengenai adanya hukum alam (natural law), tetapi tidak lagi mempersoalkan hukum alam itu sendiri.

c. Ideologi politik

Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan, atau keyakinan, suatu weltanschauung, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar dapat menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dhadapinya dan menentukan perilaku politik.

2.2 Konsep-Konsep Politik

Sejak awal hingga perkembangan yang terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. kelima cara pandang dalam melihat politik tersebut dijelaskan berikut ini.

1. klasik

sebagaimana *dikemukakan Aristoteles*, pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga Negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat.

2. kelembagaan

pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. dalam hal ini, **Max weber** merumuskan Negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu.

3. kekuasaan

pandangan ketiga, melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat , kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimana pun kekuasaan itu ditemukan.

4. fungsionalisme

fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. menyimpang dari pandangan diatas, dewasa ini para ilmuwan politik memandang kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum.

5. konflik.

menurut pandangan ini, kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkan dan/ atau mempertahankan nilai-nilai.

2.3 Sistem Politik

Pengertian Sistem dalam *Webster New Collegiate Dictionari* terdiri darikata “syn” dan “*Histania*” (*Greek*) yang berate to place together, menempatan bersama. dijelaskan lebih lanjut bahwa suatu kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip dan lain-lain,

yang membentuk suatu kesatuan yang berhubung-hubungan satu sama lain, seperti sistem pemerintahan Amerika.

Menurut Prof. Pamudji mengartikan sistem sebagai suatu kebetulan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Lebih jauh Pamudji menyatakan suatu kebetulan dan keseluruhan yang utuh dimana didalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain, menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan.

Kemudian bagaimana halnya dengan pengertian system politik . **Menurut Davis Easton** menyatakan bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai intraksi yang diabstrasikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui nilai- nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Sedangkan **Menurut Rusadi Sumintari Putra** bahwa sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Faktor yang mendorong berpartisipasi **Menurut Milbarth** adalah

1. Karena adanya perangsang
2. Karena faktor karakteristik pribadi seseorang
3. Karakter sosial menyangkut status ekonomi, kelompok ras, dan agama.
4. Faktor situasi dan lingkup politik itu sendiri.

2.4 Partisipasi Politik dan legitimasi sistem Poltik

a. Sistem Politik

(Sanit Arbi,1987: 21) Sementara revolusi membawa tuntutan yang besar perubahan sistem dan kehidupan politik Indonesia, masyarakat sendiri masih mempunyai kapasitas yang relatif rendah untuk bisa melayani segala perubahan tersebut. Masyarakat yang secara minimal memperoleh kesempatan untuk mengenal berbagai sistem politik di dunia ini dan mencoba mengurus diri sendiri dan mempraktekkan salah satu atau kombinasi dari berbagai sistem politik yang dikenalnya; di dalam waktu yang singkat sekaligus dihadapkan kepada tanggung jawab untuk mengatasi segala keterbalakangan. Demikian halnya dengan partai politik, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, masalah yang menyangkut partai serta kehidupannya sudah menjadi salah satu pembicaraan utama dikalangan para politisi Indonesia. Akan tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan pemikiran-pemikiran mereka. Ada semacam wadah untuk mencoba kehidupan kepartaian seperti Volksrad, namun kesempatan yang tersedia tidaklah memadai bagi melandasi kehidupan kepartaian yang mantap di masa setelah kemerdekaan. Disamping itu perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan belum memberikan kesempatan yang luas kepada tokoh-tokoh politik pada masa itu meletakkan dasar-dasar kehidupan partai politik seperti yang diharapkan.

2.5 Struktur Politik

Dalam pembahasan kita, struktur politik sebagai salah satu spesies struktur pada umumnya, selalu berkenan dengan alokasi nilai-nilai bersifat otoratif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.

Kekuasaan (*power*) salah satu merupakan substansi pokok pembahasan dalam ilmu politik, seperti ditulis oleh Bertrand russel dalam bukunya *power* sebagai berikut: konsep mendasar dalam ilmu soial adalah kekuasaan, seperti halnya energy dalam konsep ilmu alam; tanpa energy takkan ada sesuatu yang terjadi.

Pengertian kekuasaan disini harus benar-benar diberi makna yang netral (indifferent), dalam arti tidak secara a priori dinilai baik atau jelek, melainkan selalu bergantung pada penerapannya. Atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memintah orang lain, kapasitas demikian erat hubungannya dengan wewenang (*authority*), hak (*Right*), dan kekuatan fisik (*force, naked power*).

Menurut Karl W. Deutsch dapat diperoleh kejelasan lebih lanjut tentang pengertian politik sebagai berikut: Politik berkenaan dengan pencapaian tujuan masyarakat, bidang tugasnya ialah keputusan dengan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat dan bersifat dapat dipaksakan berlakunya. Wilayah inti politik ialah wilayah keputusan yang dapat dilaksanakan dan esensi politik, **Menurut Deutsch**, ialah koordinasi usaha manusia dapat diandalkan untuk mencapai tujuan masyarakat .

2.6 Partisipasi dan Partai Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memimpin Negara dan, secara langsung dan tidak langsung , mempengaruhi kebijakan pemerintah(*public police*) kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kegiatan, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Dibawah ini disajikan pendapat beberapa sarjana:

Menurut Herbet McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat:

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice. Political Participation in Developing Countries* partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi, dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. partisipasi bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal dan illegal, efektif atau tidak efektif.

Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science: Partisipasi politik* adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

2.7 Faktor-faktor yang menyebabkan Orang Melakukan Partisipasi Politik

Menurut Weiner (dalam Harisson, 2007: 130) terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam politik, yaitu sebagai berikut:

1. Modernisasi
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern.
4. Konflik antara kelompok pemimpin politik
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Menurut Thalha Hi Abu, dalam skripsinya menjelaskan :

Ada berbagai kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik, terlepas dari tipe sistem politik, yaitu segera muncul dalam peranan para politisi profesional, pemberi suara, aktivitas partai, para demonstran. Menempatkan posisi dari aktivitas politik memang dirasa penting, untuk melihat apakah semacam hirarki yang paling sederhana dan berarti adalah hirarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi.

2.8 Tipe tipe Kebudayaan Politik

Dalam analisis perbandingan tentang kebudayaan politik dari lima demokrasi kontemporer yang kami ajukan ini, kami menggunakan sejumlah konsep dan klasifikasi yang sangat berguna untuk menentukan dan mendefinisikannya. Kami lebih menekankan masalah kebudayaan sebuah Negara ketimbang karakter nasional atau modal peronalitasnya dan pada sosialisasi politik bukan pengembangan seseorang anak dalam artian umum. Kami menggunakan istilah kebudayaan politik, didasarkan pada dua alasan. Pertama, jika kita ingin mengetahui hubungan antar sikap-sikap politik dan non politik dengan pola-pola perkembangan, kita harus memisahkan kedua factor tersebut walaupun batas antara keduanya tidak setajam perbedaan termonologi yang kami ajukan. “istilah kebudayaan politik” terutama mengaju pada orientasi politik sikap terhadap system politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam system tersebut. pembicaraan kita tentang kebudayaan politik persis sama seperti apa yang dapat kita bicarakan tentang kebudayaan ekonomi atau kebudayaan religious. Ia adalah merupakan serangkaian orientasi menuju seperangkat obyek dan proses social yang bersifat khusus.

Tapi kita juga memilih kebudayaan politik, lebih daripada konsep khusu lainnya, karena ia memungkinkan kita mendayagunakan dan memamfaatkan kerangka kerja konseptual dan pendekatan antropologi, sosiologi dan psikologi. Pemikiran kita diperkaya bila kita menggunakan berbagai kategori antropologi dan psikologi serta sosialisasi, konflik, kebudayaan, dan akulturasi. Sama dengan itu, kemampuan kita untuk memahami kelahiran dan transformasi system politik berkembang ketika kita memamfaatkan teori dan spekulasi yang berkaitan dengan fenomena umum dari struktur dan proses social.

Kami memahami bahwa para ahli antropologi telah menggunakan istilah kebudayaan dan berbagai cara, dan untuk memasukkanya ke dalam kepustakaan ilmu politik kami berada dalam

situasi sulit, yaitu kekhawatiran akan memasukkan kedwihatianya bersamaan dengan kebaikan yang melekat di dalamnya. Disini kami menekankan bahwa kami hanya menggunakan konsep kebudayaan dalam salah satu dari sekian arti yang dihubungkan dengan nya. Orientasi psikologis menuju berbagai objek social.

Oleh karena itu konsep kebudayaan politik dapat membantu kita untuk menghindarkan diri dari pelebaran istilah seperti yang terdapat dalam terminology umum antropologi sebagai etos cultural dari asumsi homogenitas yang diterapkan dalam konsep tersebut. Konsep kebudayaan ini juga memungkinkan kita merumuskan hipotesa tentang hubungan antar komponen dari kebudayaan yang berbeda dan menguji hipotesa secara empiris. Dengan konsep sosialisasi politik kita dapat keluar dari jebakan asumsi maschab psikokultural yang sangat sederhana yang berkaitan dengan masalah hubungan antar pola-pola umum seorang anak dan seorang dewasa. Kita dapat menghubungkan sikap-sikap politik khusus orang dewasa dan propensitas tingkah laku dengan pengalaman sosialisasi politik masa anak-anak baik yang bersifat laten dan manifest.

Kebudayaan politik suatu bangsa adalah merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Sebelum kita sampai pada distribusi itu kita harus memahami berbagai cara yang sistematis orientasi individual terhadap objek-objek politik. Orientasi itu mengaju pada aspek-aspek dan objek yang dibakukan serta hubungan antar keduanya, termasuk :

1. Orientasi kognitif: pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya.
2. Orientasi efektif : perasaan terhadap system politik: parananya, para actor dan penampilanya.

3. Orientasi evaluative : keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal dan melibatkan kombinasi standar nilai dan criteria dengan informasi dan perasaan. **Gabriel Almond, Verba Sidney (1984: 13)**

2.9 Masyarakat Umum

Didalam kehidupan berkelompok dan hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. dalam mengamati masyarakat disekalilingnya, yaitu masyarakat barat, **Harold laswell** merinci delapan Nilai yaitu:

- a. Kekuasaan (power)
- b. Pendidikan dan Penerangan (*Enlighttenment*)
- c. Kekayaan (*Wealth*)
- d. Kesehatan (*Well-being*)
- e. Keterampilan (*Skill*)
- f. Kasih Sayang (*Afection*)
- g. Kejujuran (*Rectitude*)
- h. Penghormatan (*Respect*)

Dengan adanya berbagai nilai-nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus

defenisi masyarakat menurut **Robert Maclver**: masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan dan menurut perumusan **Harold J. Laski dari London school of economic and political science** maka masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.

Beberapa orang serjana telah mencoba untuk memberikan defenisi masyarakat (*society*)

1. **Maclever dan Page** mengatakan bahwa “ masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku sert kebebasan-kebebasan manusia. keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat.
2. **Ralph Linton** masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
3. **Selo Soemardjan** menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Walaupun defenisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan, pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur berikut.

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. apabila dibandingkan dengan mahluk hidup lain seperti hewan, misalnya , manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati.manusia yang dikurung sendirian disuatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada pribadinya sehingga lama kelamaan dia akan mat. **Soerjono Soekanto (1982:22)**

2.10. Sistem Pemilihan

Dalam ilmu politik, dikenal bermacam-macam sistem pemilihan, tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip, yaitu :

1. *Single-member Constituency* (Sistem Distrik), yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil.
2. *Multi-member Constituency* (system Proporsional), yaitu satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.

Sistem Single member constituency mempunyai beberapa keuntungan.

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai- partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
2. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional.
3. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. **Meriam Budiarto (1992:177)**

2.11 Perilaku Memilih

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditunjukkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa dan nasionalisme. Jumlah partai, basis sosial sistem partai dan program-program yang ditonjolkan mungkin berbeda dari suatu negara ke negara lain karena perbedaan struktur sosial tersebut.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kegiatan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan,

pendidikan, kelas, pendapatan dan agama. Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kalau di Amerika Serikat terdapat distrik, precinct, dan ward. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum. Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data kabupaten berbeda dengan karakteristik data tingkat Kecamatan.

Pada dasarnya pendekatan psikologi sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan di atas. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa indentifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konsekuensinya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Selanjutnya, pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga dari perbedaan dari alternatif berupa yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih,

terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih. **Ramlan Surbakti (1992:146)**

2.13 Pilkada langsung Menurut UU nomor 32 tahun 2004 dan beberapa perubahan UU perubahannya setelah putusan MK yang menyangkut Pilkada

Menurut I.B.G Suryatmaja M beberapa pertimbangan yang melandasi Pilkada langsung adalah:

1. sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah
2. dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi.
3. dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI, kedudukan kepala daerah mempunyai peran yang sangat strategis.

Pilkada langsung merupakan perubahan penting dalam proses konsolidasi demokrasi di aras local. setidaknya, pilkada langsung dipandang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem rekrutmen politik melalui institusi DPRD. **Menurut AA GN Ari Dwipayana**, setidaknya ada beberapa kondisi yang mendorong pilkada dilakukan secara langsung. pengaturan Pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. **Suharizal (2012:3)**

2.14 Proses Pemilu

Pemilu merupakan proses politik yang segera konstitusional bersifat niscaya bagi demokrasi. Sebagai sistem, demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi yang populis, adil dan beradab, kendati buka tanpa kelemahan. Begitu tak berbantahnya tesis-tesis demokrasi sehingga hampir semua penguasa otoriter dan tiran menyebut sistem yang dingunakannya sebagai sistem demokratis. (Joko J. Prihatmoko Moesafa 2008:43)

2.15 Kengrangka Berfikir

Dalam pengkajian Teori yang telah dikemukakan bahwa salah satu factor yang dapat menentukan keberhasilan dalam pemilihan Walikota adalah Tingkat partisipasi masyarakat yang merupakan pemandu dalam suatu proses pemilihan yang harus mengarahkan jalanya sistem pemilihan yang baik. Dalam mencapai tujuan proses pemilihan Walikota.

Seperti masyarakat Tionghoa yang sudah menetap tinggal di Kota Medan dan menjadi warga Indonesia berhak di pilih dan memilih. Dapat kita ketahui,saat ini dalam sistem pemilihan banyak mencalonkan untuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi jika kita lihat masalah yang sering dihadapi saat ini masih banyak pemimpin mempengaruhi masyarakat untuk memilih pemimpin tersebut dengan money politik dengan membagi bangikan uang kepada masyarakat agar terpilih sebagai pemimpin.

Bagi masyarakat umum, pemilihan langsung sering ditafsirkan sebagai kesempatan bagi-bagi uang. Mereka tahu bahwa tiap-tiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompotisi. Anggaran itu biasanya untuk pos-pos pengeluaran utama berupa pemeliharaan jaringan pendukung dari tim sukses sampai ketingkat coordinator lapangan di desa-desa, biaya untuk kampanye, biaya lobi dan promosi untuk komsumsi, dan lain-lain.

Dengan rata-rata kandidat yang cukup besar, wajar apabila rakyat berharap ikut merasakan cipratan uang itu. Sebaliknya, para kandidat pun sadar sepenuhnya bahwas dalam pemilihan langsung diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk “membujuk” para pemilih agar menentukan pilihannya kepada mereka.

2.16 Defenisi Konsep

1. Partisipasi adalah ikut berperan serta dalam kegiatan. Dalam perkataan yang lebih luas partisipasi pada hakekatnya adalah ikut sertanya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar.
2. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).
3. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.
4. Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang atau kelompok orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam ilmu politik, dikenal bermacam-macam sistem pemilihan.

2.17 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, defenisi operasional adalah

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama

Tabel 1.3

Operasionalisasi Variabel Penelitian Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tionghoa

No	Variabel	Dimensi	Indicator
1	Partisipasi politik Masyarakat	-perangsang -karakteristik -karakter sosial -situasi	-Diskusi politik -watak sosial - aktivitas politik -ekonomi -kelompok -etnis -perilaku -keterbukaan -kejujuran kondusif -totaliter

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah “Metode penelitian kualitatif yaitu yang dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian Penelitian ini akan menjelaskan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Medan 2009-2014.

3.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Adapun alasan dalam memilih lokasi penelitian ini adalah:

- a. Belum pernah dilakukan penelitian tentang Tingkat Partisipasi masyarakat Tionghoa dalam memilih Walikota Medan di Universitas HKBP Nomensen sebelumnya.
- b. Jarak lokasi tidak terlalu jauh dari tempat dan mudah dijangkau.

3.3 Tehnik pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara Terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

3.4 Informan Penelitian

Untuk memperdalam analisis data yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Walikota Medan di Kecamatan Medan Petisah, maka akan dibagikan kuesioner secara mendalam dengan Informan kunci, seperti masyarakat Tionghoa sebanyak 30 orang.

3.5 Tehnik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Selama dilapangan dan selesai dilapangan. Dalam hal ini analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus menerus sampai penulisan hasil penelitian.